



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 177 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 28 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

## BAB II RENCANA KERJA

### Pasal 2

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2022.

### Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Sistematika Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
  - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  - e. Penutup.
- (3) Rincian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 4

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 27 Desember 2021

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 177 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 177 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2022

**RENCANA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan manusia seutuhnya, sudah seharusnya memiliki atau berada pada suatu kondisi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu menempatkan manusia sebagai yang utama dalam pembangunan (subyek), dengan implikasi bahwa pemerintah (birokrasi) lebih berperan sebagai fasilitator terhadap adanya peluang dalam membangkitkan kreativitas manusia dan masyarakat guna mewujudkan *Self Sustaining Capacity*, yaitu dengan menerapkan model perencanaan partisipatif (tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Berawal dari perencanaan partisipatif tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan Program Bangga Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa Program Bangga Kencana merupakan urusan wajib. Artinya, bahwa penyelenggaraan Program Bangga Kencana harus dilaksanakan, sekaligus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan

Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana. Sebagai implementasi tugas-tugas tersebut, salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2022 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor: 005/7865/35.07.032/2020, tanggal 25 November 2020 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Malang; Surat Edaran Bupati Malang, Nomor 2139 Tahun 2021, tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022; Surat Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Nomor: 050/1900/35.07.202/2021, tanggal 17 Maret 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022; Surat Sekretariat Daerah Nomor: 005/4005/35.07.032/2021, tanggal 18 Mei 2021 tentang Rapat Koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, memuat kebijakan, program dan kegiatan Bangga Kencana Kabupaten Malang Tahun 2022. Proses penyusunan Renja, diawali dengan penghimpunan berbagai usulan masyarakat melalui media Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Setiap usulan masyarakat, selanjutnya dijadikan dasar kajian dan diposisikan sebagai prioritas kebijakan dalam perumusan Rencana Kerja Program Bangga Kencana. Sebelum perumusan Rencana Kerja, diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja. Tim tersebut bertugas dalam merumuskan dan menyusun Rencana Kerja, hingga menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022. Proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara bertahap dan intensif melalui media rapat Tim.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, didasarkan pada: (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022; (2) Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, sekaligus sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Kabupaten Malang Tahun 2022.

Keberhasilan Program Bangsa Kencana mempunyai andil dalam pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan melalui pembangunan keluarga berkualitas, dengan harapan bahwa setiap keluarga mampu merencanakan kehidupannya agar menjadi lebih berkualitas dan sejahtera

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Program Bangsa Kencana, yaitu masih rendahnya kualitas ber-KB, masih tingginya perkawinan usia di bawah 20 tahun, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Bangsa Kencana, dan masih lemahnya pembinaan ketahanan keluarga. Guna menjawab permasalahan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya untuk mengatasinya, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya eksisting secara optimal, dengan berdasarkan prinsip efektif, efisien dan berkelanjutan (*Sustainable*), diikuti dengan peningkatan kemudahan akses program, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

Namun perlu disadari, bahwa jejaring operasional lini lapangan pada kenyataannya belum mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan Program Bangsa Kencana secara menyeluruh. Menyikapi kondisi tersebut, perlu dilakukan penguatan partisipasi masyarakat melalui Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) secara kualitasnya. IMP dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD untuk ditingkatkan kualitasnya serta melibatkan unsur legislatif, Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM), TNI, POLRI, PKK, profesi dan komponen masyarakat sebagai wujud pendekatan Program Bangsa Kencana di berbagai segmen sasaran.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 28 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, serta analisa capaian kinerja Tahun 2020. Pada sisi lain, Rencana Kerja Tahun 2022 juga memuat program dan kegiatan Tahun 2022, sekaligus memuat sasaran yang ingin dicapai Tahun 2022 (sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026).

#### **1.3.1 Maksud**

1. Menjabarkan isu-isu strategis, yang diperkirakan akan berdampak pada penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana.
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB berkualitas, yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas Program Bangga Kencana Tahun 2022.
3. Mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya, yang akan dijadikan sebagai kekuatan dalam Program Bangga Kencana.
4. Memberikan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Program Bangga Kencana antara pemerintah pusat dan daerah, antar waktu maupun antar program.
2. Terjalannya keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan Program Bangga Kencana, guna tercapainya sasaran lima tahun ke depan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang didasarkan pada kemampuan dan prioritas pembangunan.
3. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2022.
4. Tersedianya acuan pelaksanaan bagi para pelaksana dan pengelola Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

##### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- l) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c) Pengadaan Meubelair;
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- f) Pembangunan Gedung Kantor;
- g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
  - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Pengembangan Data dan Informasi.  
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
  - a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data;
  - b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR);
  - c) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS);
  - d) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan;
  - e) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - f) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK);
  - g) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK);
  - h) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK).
7. Program Pelayanan Keluarga Berencana  
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
  - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi;
  - b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR);
  - c) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi;
  - d) Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - e) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK);
  - f) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK).
8. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga  
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
  - a) Bina Ketahanan Remaja;
  - b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
  - c) Pemberdayaan Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
  - d) Bina Ketahanan Remaja (DAK);
  - e) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK);

- f) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK).
9. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana  
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
- a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB;
  - b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa;
  - c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana;
  - d) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK);
  - e) Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK);
  - f) Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK).

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2021  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>2.208</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>									
<b>2.208.13</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
<b>2.208.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>98,83 %</b>	<b>98,83%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>* 100,00%</b>
2.208.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12.000 buah	15.538 buah	4.000 buah	4.209 buah	105,23%	4.000 buah	23.747 buah	197,89%
2.208.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	72 bulan	200,00%
2.208.13.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	36 ob	67 ob	108 ob	156 ob	144,44%	108 ob	108 ob	* 300,00%
2.208.13.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 ob	36 ob	- ob	- ob	0,00%	- ob	36 ob	100,00%
2.208.13.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	96 jenis	145 jenis	77 jenis	73 jenis	94,81%	70 jenis	288 jenis	300,00%
2.208.13.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	18 jenis	22 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00%	5 jenis	31 jenis	172,22%
2.208.13.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 jenis	37 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00%	6 jenis	49 jenis	163,33%
2.208.13.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	9 jenis	11 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00%	2 jenis	15 jenis	166,67%
2.208.13.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	7.200 hok	5.668 hok	450 hok	450 hok	100,00%	550 hok	6.668 hok	92,61%
2.208.13.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	375 hok	408 hok	57 hok	54 hok	94,74%	157 hok	619 hok	165,07%
2.208.13.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	480 hok	662 hok	155 hok	179 hok	115,48%	299 hok	1.140 hok	237,50%
2.208.13.01.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	36 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	48 bulan	133,33%
<b>2.208.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>98,70 %</b>	<b>98,70%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>* 100,00%</b>
2.208.13.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	9 jenis	9 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00%	4 jenis	14 jenis	155,56%
2.208.13.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 jenis	27 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00%	3 jenis	34 jenis	161,90%
2.208.13.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	6 jenis	11 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00%	6 jenis	21 jenis	350,00%
2.208.13.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00%	1 gedung	1 gedung	* 100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.208.13.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	149 unit	134 unit	14 unit	16 unit	114,29%	159 unit	149 unit *	100,00%
2.208.13.02.06	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	10 unit	15 unit	6 unit	10 unit	166,67%	2 unit	25 unit	250,00%
2.208.13.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	33 gedung	29 gedung	30 gedung	30 gedung	100,00%	30 gedung	31 gedung *	93,94%
<b>2.208.13.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 % *</b>	<b>100,00%</b>
2.208.13.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	150 stel	239 stel	65 stel	65 stel	100,00%	65 stel	369 stel	246,00%
<b>2.208.13.04</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>- %</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 % *</b>	<b>100,00%</b>
2.208.13.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	300 orang	195 orang	46 orang	- orang	0,00%	46 orang	241 orang	80,33%
<b>2.208.13.05</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 % *</b>	<b>100,00%</b>
2.208.13.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masvarakat) (Buku)	12 buku	16 buku	4 buku	4 buku	100,00%	4 buku	24 buku	200,00%
2.208.13.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	3 buku	4 buku	1 buku	1 buku	100,00%	1 buku	6 buku	200,00%
2.208.13.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	4 buku	1 buku	1 buku	100,00%	1 buku	6 buku	200,00%
<b>2.208.13.06</b>	<b>Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 % *</b>	<b>100,00%</b>
2.208.13.06.01	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1.170 dokumen	1.560 dokumen	390 dokumen	390 dokumen	100,00%	390 dokumen	2.340 dokumen	200,00%
2.208.13.06.02	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	3 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	6 dokumen	200,00%
2.208.13.06.03	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	3 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	6 dokumen	200,00%
2.208.13.06.04	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	133,33%
2.208.13.06.05	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	133,33%
2.208.13.06.06	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1.170 dokumen	780 dokumen	390 dokumen	390 dokumen	100,00%	390 dokumen	1.560 dokumen	133,33%
2.208.13.06.07	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	133,33%
2.208.13.06.08	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	133,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
<b>2.208.13.07</b>	<b>Program Pelayanan Keluarga Berencana</b>	<b>Persentase Peserta KB MKJP</b>	<b>40,00 %</b>	<b>32,16 %</b>	<b>40,00 %</b>	<b>32,21 %</b>	<b>80,53%</b>	<b>40,00 %</b>	<b>40,00 %</b>	<b>*</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Persentase PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)</b>	<b>100 %</b>	<b>92,45 %</b>	<b>89,47 %</b>	<b>119,08 %</b>	<b>133,09%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>*</b>	<b>100,00%</b>
2.208.13.07.01	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	343.625 akseptor	385.575 akseptor	329.294 akseptor	394.708 akseptor	119,86%	343.625 akseptor	343.625 akseptor	*	100,00%
2.208.13.07.02	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3.800 orang	3.513 orang	3.400 orang	4.525 orang	133,09%	3.800 orang	3.800 orang	*	100,00%
2.208.13.07.03	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	45 klinik	96 klinik	94 klinik	97,92%	96 klinik	96 klinik	*	100,00%
2.208.13.07.04	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	34.181 PUS	53.525 PUS	36.979 PUS	53.022 PUS	143,38%	96 PUS	96 PUS	*	0,28%
2.208.13.07.05	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.800 orang	3.513 orang	3.400 orang	4.525 orang	133,09%	3.800 orang	3.400 orang	*	89,47%
2.208.13.07.06	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	72 klinik	96 klinik	94 klinik	97,92%	96 klinik	96 klinik	*	100,00%
<b>2.208.13.08</b>	<b>Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase BKR Paripurna</b>	<b>62,26 %</b>	<b>53,46 %</b>	<b>54,72 %</b>	<b>54,72 %</b>	<b>100%</b>	<b>62,26 %</b>	<b>62,26 %</b>	<b>*</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB</b>	<b>88,15 %</b>	<b>86,21 %</b>	<b>88,00 %</b>	<b>84,19 %</b>	<b>95,67%</b>	<b>88,15 %</b>	<b>88,15 %</b>	<b>*</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Persentase Kelompok UPPKS Mandiri</b>	<b>47,47 %</b>	<b>27,59 %</b>	<b>46,46 %</b>	<b>27,88 %</b>	<b>60,01%</b>	<b>47,47 %</b>	<b>47,47 %</b>	<b>*</b>	<b>100,00%</b>
2.208.13.08.01	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	27 kelompok	23 kelompok	23 kelompok	100,00%	25 kelompok	25 kelompok	*	100,00%
2.208.13.08.02	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.866 akseptor	41.688 akseptor	38.331 akseptor	40.550 akseptor	105,79%	38.866 akseptor	38.866 akseptor	*	100,00%
2.208.13.08.03	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	40 kelompok	46 kelompok	46 kelompok	100,00%	47 kelompok	47 kelompok	*	100,00%
2.208.13.08.04	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	27 kelompok	23 kelompok	23 kelompok	100,00%	25 kelompok	25 kelompok	*	100,00%
2.208.13.08.05	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.866 akseptor	41.688 akseptor	38.331 akseptor	40.550 akseptor	105,79%	38.866 akseptor	38.866 akseptor	*	100,00%
2.208.13.08.06	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	40 kelompok	46 kelompok	46 kelompok	100,00%	47 kelompok	47 kelompok	*	100,00%
<b>2.208.13.09</b>	<b>Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana</b>	<b>Persentase PPKBD Mandiri</b>	<b>69,49 %</b>	<b>54,10 %</b>	<b>61,79 %</b>	<b>61,79 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,49 %</b>	<b>69,49 %</b>	<b>*</b>	<b>100,00%</b>
2.208.13.09.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	211 orang	241 orang	241 orang	100,00%	271 orang	271 orang	*	100,00%
2.208.13.09.02	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	295 orang	300 orang	300 orang	100,00%	305 orang	305 orang	*	100,00%
2.208.13.09.03	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	390 orang	390 orang	390 orang	100,00%	390 orang	390 orang	*	100,00%
2.208.13.09.04	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	211 orang	241 orang	241 orang	100,00%	271 orang	271 orang	*	100,00%
2.208.13.09.05	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	295 orang	300 orang	300 orang	100,00%	305 orang	305 orang	*	100,00%
2.208.13.09.06	Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	390 orang	390 orang	390 orang	100,00%	390 orang	390 orang	*	100,00%

Keterangan : (\*) Perkiraan realisasi didasarkan pada target hasil akhir tahun berjalan

Tabel 2.1 menjelaskan bahwa capaian kinerja program/kegiatan hingga Tahun 2020 diukur berdasarkan target akhir tahun, yang didasarkan pada target Rencana Kerja Tahun 2020.

Terdapat beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2020 yang belum terpenuhi, yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (indikator Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran : Target = 100%; Realisasi = 98,83%; Capaian = 98,83%).
  - a) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (indikator Jumlah alat tulis kantor yang disediakan : Target = 77 jenis ; Realisasi = 73 jenis; Capaian = 94,81 %.
  - b) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (indikator Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah : Target = 57 hok; Realisasi = 54 hok; Capaian = 94,74%).
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah : Target = 100%; Realisasi = 00,00%; Capaian = 00,00%).
  - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan : Target = 46 orang; Realisasi = 0 orang; Capaian = 00,00%). Hal ini disebabkan karena adanya refocussing anggaran, sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan
- 3) Program Pelayanan Keluarga Berencana (indikator Persentase Peserta KB MKJP : Target = 40,00%; Realisasi = 32,21%; Capaian = 80,53%).
  - a) Kegiatan Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (indikator Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai : Target = 96 klinik; Realisasi = 94 klinik; Capaian = 97,92%).
  - b) Kegiatan Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK) (indikator Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai :Target = 96 klinik; Realisasi = 94 klinik; Capaian = 97,92%). Hal ini disebabkan karena pada pertengahan tahun terdapat 2 (dua) Faskes yang sudah tidak melayani pemasangan Alokon.
- 4) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (indikator Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB : Target = 88,00%; Realisasi = 84,19%; Capaian = 95,67% dan Persentase

Kelompok UPPKS Mandiri : Target = 46,46%; Realisasi = 27,88%;  
Capaian= 60,01%).

Berdasarkan pada indikator program/kegiatan yang tidak terpenuhi tersebut di atas, dapat berdampak pada:

1) Program Pelayanan Keluarga Berencana:

a) Dengan tidak tercapainya indikator dari dua kegiatan dalam program tersebut, maka akan mempengaruhi capaian indikator Persentase Peserta KB MKJP dan Persentase PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR) yang akan berdampak pada kualitas kepesertaan ber-KB, sehingga rentan terhadap Drop Out (DO) ber-KB. Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi fluktuasi kepesertaan KB, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR).

2) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga:

a) Pada kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera dengan indikator Persentase Kelompok UPPKS Mandiri tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator kinerja tersebut, akan berdampak lemahnya pembinaan kegiatan ekonomi produktif pada keluarga, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera, karena tidak adanya wadah kegiatan ekonomi produktif yang mumpuni di masyarakat, sehingga akan menimbulkan lemahnya ketahanan ekonomi keluarga.

Sebagai tindak lanjut untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya-upaya, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait (Bag Umum, BKPSDM, BKKBN, dll) sehingga penggunaan anggaran bisa lebih efisien dan tidak terjadi sisa anggaran yang besar di kemudian hari.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok BKB melalui pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, dengan mengembangkan kelompok BKB Integrasi.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS melalui pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, dengan bekerjasama dengan lembaga dan instansi terkait.
- 4) Peningkatkan partisipasi masyarakat (PPKBD, Sub PPKBD, TOGA dan TOMA) dalam Program Bangga Kencana;
- 5) Mengajukan tambahan tenaga lini lapangan (PKB/PLKB).

- 6) Mengajukan penyediaan anggaran yang proporsional, atau dengan menggeser anggaran pada beberapa kegiatan yang telah melampaui target pada kegiatan yang belum mencapai target.

Beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2020 yang sudah terpenuhi, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat terpenuhi dengan baik, termasuk pada kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain :  
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat terpenuhi dengan baik, termasuk pada setiap kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 3) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk dapat terpenuhi dengan baik, termasuk pada setiap kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain:
  - a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data;
  - b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR);
  - c) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS);
  - d) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan; 5) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - e) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK);
  - f) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK);
  - g) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK).
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana dapat terpenuhi dengan baik, termasuk pada setiap kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain:
  - a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana;
  - b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa;
  - c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana;
  - d) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK);
  - e) Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK);

## f) Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK);

Beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2020 yang sudah terpenuhi melampaui target, yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada indikator Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah); indikator Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB); dan indikator Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada indikator Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit); indikator Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)
- 3) Program Pelayanan Keluarga Berencana pada indikator Jumlah peserta KB Aktif; indikator Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR); indikator Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB).
- 4) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga pada indikator Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB.

Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, sehingga berdasarkan analisa perkiraan capaian indikator kinerja program/kegiatan masih belum sesuai dengan harapan target Renstra. Namun, optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan harus ditingkatkan, dengan harapan agar target capaian pada tahun-tahun sebelumnya juga bisa terpenuhi pada tahun berjalan.

Untuk perhitungan capaian indikator kinerja didasarkan pada hasil perbandingan realisasi capaian program kegiatan terhadap target program/kegiatan Renja Tahun 2020. Metode perhitungan pada realisasi capaian program kegiatan, didasarkan pada hasil penjumlahan realisasi capaian awal masa berlakunya Renstra (Tahun 2016) hingga tahun berjalan 2020 (perkiraan capaian), hal ini dikarenakan semua indikator tidak mengalami perubahan (sama).

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Sejak Tahun 2020, IKU terdiri dari 3 (Tiga) indikator, antara lain:
  - 1) Persentase Peserta KB Aktif;
  - 2) Persentase Kampung KB Aktif; dan
  - 3) Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar.
2. Indikator Program/kegiatan, terdiri dari:
  - 1) Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
    - a. Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah);
    - b. Jumlah penyediaan Listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan);
    - c. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob);
    - d. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis);
    - e. Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis);
    - f. Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis);
    - g. Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis);
    - h. Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (hok);
    - i. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok);
    - j. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok); dan
    - k. Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (DAK) (bulan).
  - 2) Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
    - a. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis);
    - b. Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis);
    - c. Jumlah meubelair meubelair yang diadakan (jenis);
    - d. Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis);
    - e. Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit);

- f. Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit); dan
  - g. Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (DAK) (jenis).
- 3) Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
    - a. Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel).
  - 4) Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
    - a. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang).
  - 5) Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
    - a. Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku);
    - b. Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku); dan
    - c. Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku).
  - 6) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan
    - a. Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan;
    - b. Jumlah dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR);
    - c. Jumlah dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
    - d. Jumlah dokumen parameter;
    - e. Jumlah dokumen mutasi keluarga;
    - f. Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (DAK);
    - g. Jumlah dokumen parameter (DAK); dan
    - h. Jumlah dokumen mutasi keluarga (DAK).
  - 7) Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR) dan Persentase Peserta KB MKJP
    - a. Jumlah peserta KB Aktif;
    - b. Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR);
    - c. Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai;
    - d. Jumlah *Unmetneed* (pasangan usia subur yang belum terlayani KB);
    - e. Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR) (DAK); dan
    - f. Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai (DAK).

- 8) Persentase BKR Paripurna;  
Persentase Kelompok UPPKS Mandiri;  
Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB.
  - a. Jumlah kelompok PIK Remaja Tegar;
  - b. Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB;
  - c. Jumlah kelompok UPPKS Mandiri;
  - d. Jumlah kelompok PIK Remaja Tegar (DAK);
  - e. Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB (DAK); dan
  - f. Jumlah kelompok UPPKS Mandiri (DAK).
- 9) Persentase PPKBD Mandiri
  - a. Jumlah PPKBD Mandiri;
  - b. Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik;
  - c. Jumlah PPKBD Aktif;
  - d. Jumlah PPKBD Mandiri (DAK);
  - e. Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (DAK); dan
  - f. Jumlah PPKBD Aktif (DAK).

Beberapa indikator tersebut diukur berdasarkan indikator target daerah, yang mengacu pada perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Tabel 2.2  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN MALANG**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Indikator Eselon II, terdiri :</b>											
	1 Persentase Peserta KB Aktif			68,94%	69,84%	-	-	76,55%	69,84%	-	-	
	2 Persentase Kampung KB Aktif			50,00%	90,00%	-	-	50,00%	90,00%	-	-	
	3 Persentase kelompok PIK Remaja Tegar			23,96%	26,04%	-	-	17,16%	26,04%	-	-	
<b>2</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>98,83%</b>	<b>100%</b>	-	-	
	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			4.000 buah	4.000 buah	-	-	4.209 buah	4.000 buah	-	-	
	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)			12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	-	-	
	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob)			12 ob	108 ob	-	-	156 ob	108 ob	-	-	
	4 Jumlah petugas kebersihan (ob)			12 ob	-	-	-	-	-	-	-	
	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)			32 jenis	70 jenis	-	-	73 jenis	70 jenis	-	-	
	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)			6 jenis	5 jenis	-	-	4 jenis	5 jenis	-	-	
	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)			10 jenis	6 jenis	-	-	6 jenis	6 jenis	-	-	
	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			3 jenis	2 jenis	-	-	2 jenis	2 jenis	-	-	
	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (hok)			2.400 hok	550 hok	-	-	450 hok	550 hok	-	-	
	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok)			125 hok	157 hok	-	-	54 hok	157 hok	-	-	
	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok)			160 hok	299 hok	-	-	179 hok	299 hok	-	-	
	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (bulan)			12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	-	-	
<b>3</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>98,70%</b>	<b>100%</b>	-	-	
	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			3 jenis	4 jenis	-	-	1 jenis	4 jenis	-	-	
	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			7 jenis	3 jenis	-	-	4 jenis	3 jenis	-	-	
	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)			2 jenis	6 jenis	-	-	4 jenis	6 jenis	-	-	
	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			1 gedung	1 gedung	-	-	1 gedung	1 gedung	-	-	
	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)			149 unit	159 unit	-	-	16 unit	159 unit	-	-	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)			-	2 unit	-	-	10 unit	2 unit	-	-	
	7 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)			29 gedung	30 gedung	-	-	30 gedung	30 gedung	-	-	
<b>4</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (stel)			50 stel	65 stel	-	-	65 stel	65 stel	-	-	
<b>5</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>100%</b>	-	-	
	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			100 orang	46 orang	-	-	-	46 orang	-	-	
<b>6</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)			4 buku	4 buku	-	-	4 buku	4 buku	-	-	
	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)			1 buku	1 buku	-	-	1 buku	1 buku	-	-	
	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)			1 buku	1 buku	-	-	1 buku	1 buku	-	-	
<b>7</b>	<b>Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan			390 dokumen	390 dokumen	-	-	390 dokumen	390 dokumen	-	-	
	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)			1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)			1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	4 Jumlah dokumen parameter			1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	5 Jumlah dokumen mutasi keluarga			1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan (DAK)			390 dokumen	390 dokumen	-	-	390 dokumen	390 dokumen	-	-	
	7 Jumlah dokumen parameter (DAK)			1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga (DAK)			1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
<b>8</b>	<b>Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA)</b>			<b>89,47%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	<b>32,21%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	
	<b>Persentase Peserta KB MKJP</b>			<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	-	-	<b>119,08%</b>	<b>40,00%</b>	-	-	
	1 Jumlah peserta KB Aktif			329.294 akseptor	343.625 akseptor	-	-	394.708 akseptor	343.625 akseptor	-	-	
	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)			3.400 orang	3.800 orang	-	-	4.525 orang	3.800 orang	-	-	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3			96 klinik	96 klinik	-	-	94 klinik	96 klinik	-	-	
	4			36.979 PUS	34.181 PUS	-	-	53.022 PUS	34.181 PUS	-	-	
	5			3.400 orang	3.800 orang	-	-	4.525 orang	3.800 orang	-	-	
	6			96 klinik	96 klinik	-	-	94 klinik	96 klinik	-	-	
<b>9</b>	<b>Persentase BKR Paripurna</b>			<b>54,72%</b>	<b>62,26%</b>	-	-	<b>54,72%</b>	<b>62,26%</b>	-	-	
	<b>Persentase Kelompok UPPKS Mandiri</b>			<b>46,46%</b>	<b>47,47%</b>	-	-	<b>27,88%</b>	<b>47,47%</b>	-	-	
	<b>Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB</b>			<b>88,00%</b>	<b>88,15%</b>	-	-	<b>84,19%</b>	<b>88,15%</b>	-	-	
	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar			23 kelompok	25 kelompok	-	-	23 kelompok	25 kelompok	-	-	
	2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB			38.331 akseptor	38.866 akseptor	-	-	40.550 akseptor	38.866 akseptor	-	-	
	3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri			46 kelompok	47 kelompok	-	-	46 kelompok	47 kelompok	-	-	
	4 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar (DAK)			23 kelompok	25 kelompok	-	-	23 kelompok	25 kelompok	-	-	
	5 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB (DAK)			38.331 akseptor	38.866 akseptor	-	-	40.550 akseptor	38.866 akseptor	-	-	
	6 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri (DAK)			46 kelompok	47 kelompok	-	-	46 kelompok	47 kelompok	-	-	
<b>10</b>	<b>Persentase PPKBD Mandiri</b>			<b>61,79%</b>	<b>69,49%</b>	-	-	<b>61,79%</b>	<b>69,49%</b>	-	-	
	1 Jumlah PPKBD Mandiri			241 orang	271 orang	-	-	241 orang	271 orang	-	-	
	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik			300 orang	305 orang	-	-	300 orang	305 orang	-	-	
	3 Jumlah PPKBD Aktif			390 orang	390 orang	-	-	390 orang	390 orang	-	-	
	4 Jumlah PPKBD Mandiri (DAK)			241 orang	271 orang	-	-	241 orang	271 orang	-	-	
	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik (DAK)			300 orang	305 orang	-	-	300 orang	305 orang	-	-	
	6 Jumlah PPKBD Aktif (DAK)			390 orang	390 orang	-	-	390 orang	390 orang	-	-	

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa ketiga Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang telah mencapai target Renja Tahun 2020, bahkan pada indikator Persentase Peserta KB Aktif (target = 68,94% realisasi = 76,55% capaian = 111,00%) telah melampaui target Renta Tahun 2020, dan Persentase Kampung KB Aktif (target = 50,00% realisasi 50,00% capaian = 100%) sudah mencapai target. Sedangkan untuk indikator Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar (target = 23,96% realisasi = 17,16% capaian = 71,62%) belum mencapai target Renja Tahun 2020 yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa kinerja DPPKB Kabupaten Malang menuai hasil yang bagus pada tahun keempat pelaksanaan Renstra. Maka dari itu pelaksanaan Renja tahun selanjutnya diharapkan DPPKB Kabupaten Malang lebih meningkatkan kinerja baik dari segi kuantitas dan kualitas, guna tercapainya target DPPKB Kabupaten Malang sendiri maupun mendukung misi dari Kepala Daerah Kabupaten Malang. Khususnya yang menjadi perhatian bagi DPPK Kabupaten Malang adalah untuk lebih meningkatkan capaian indikator PIK Remaja Tegar guna mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kabupaten Malang merupakan sebuah wilayah terluas ke dua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Letak geografis Kabupaten Malang berada di bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga wilayah tersebut tergolong sangat strategis, karena berada pada pertemuan Kabupaten Pasuruan, Kediri, Blitar dan Lumajang. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Malang, sebagian besar wilayah merupakan kawasan perdesaan, dengan budaya masyarakat tradisional dan paternalistik.

Berdasarkan kondisi demografi, Kabupaten Malang merupakan wilayah berpenduduk terbesar ke dua di Jawa Timur (2.654.448 Jiwa) setelah kota Surabaya (Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2020) sehingga berimplikasi pada kompleksnya permasalahan pembangunan di Kabupaten Malang.

Jika ditinjau dari luas wilayah, jumlah penduduk dan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Malang, maka pengelolaan Program Bangsa

Kencana harus dilaksanakan berdasarkan segmentasi sasaran, hal ini bertujuan agar pengelolaan Program Bangga Kencana lebih selaras dan tepat sasaran. Upaya tersebut bisa dilaksanakan, jika terbangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diimbangi dengan SDM pengelola Program Bangga Kencana yang responsif dan handal.

Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang bukanlah perkara mudah, hal ini disadari begitu kompleksnya permasalahan yang muncul, serta pencapaian program nasional yang tertuang dalam SPM dan SDGs. Dampak dari kondisi tersebut, adalah:

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah.  
Dengan rendahnya kualitas data basis kependudukan dan keluarga, akan berdampak sulitnya dalam memetakan sasaran, sehingga pembinaan Program Bangga Kencana menjadi tidak tepat sasaran.
2. Tingginya angka Drop Out KB akibat masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).  
Tingginya angka Drop Out KB, akan berdampak pada menurunnya kepesertaan KB, meningkatkan LPP dan TFR. Penyebab utama kondisi tersebut adalah masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
3. Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun).  
Perkawinan usia muda mempunyai pengaruh besar terhadap Program Bangga Kencana, hal ini disebabkan masa subur pada usia < 20 tahun lebih panjang, sehingga peluang mempunyai anak menjadi lebih besar.
4. Kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) masih rendah.  
Sebagai dampak rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Program Bangga Kencana, adalah menurunnya kapasitas pembinaan program tersebut. Hal ini mengingat bahwa masyarakatlah yang menjadi ujung tombak keberhasilan Program Bangga Kencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka program Bangga Kencana dilaksanakan secara beriringan/sejalan. Peningkatan kuantitas dan kualitas IMP mutlak diperlukan, sebab IMP merupakan wahana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang

langsung berhadapan dengan masyarakat, pada sisi lain untuk menyikapi keterbatasan tenaga PKB/PLKB di lapangan.

5. Kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS masih rendah.

Rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS, akan berdampak pada menurunnya pembinaan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga.

Peningkatan kuantitas dan kualitas ketahanan keluarga, merupakan bagian dari upaya peningkatan sumberdaya manusia berkualitas, yang diwujudkan melalui media kelompok bina keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun pada kenyataannya, bahwa kualitas beberapa kelompok bina keluarga dan UPPKS masih belum sesuai harapan.

Beberapa permasalahan tersebut di atas perlu segera diatasi, dengan memfokuskan program dan kegiatan pada upaya-upaya pemecahan masalah Program Bangga Kencana.

Program Bangga Kencana merupakan bagian dari upaya pokok dalam pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sekaligus sebagai bagian integral pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 (Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025) tentang Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa BKKBN yang awalnya hanya menangani program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Nasional, saat ini lebih dipertegas fungsinya dalam menjalankan kebijakan kependudukan, baik dari segi kuantitas, kualitas dan mobilitas. Penanganan permasalahan kependudukan tidak mungkin mampu diselesaikan secara spasial, namun diperlukan keterlibatan berbagai sektor terkait, dengan meningkatkan sinergi dan integrasi antar program. Menyikapi kondisi tersebut, maka sangat diperlukan komitmen *stakeholders*, agar pelaksanaan Program Bangga Kencana dapat tercapai sesuai dengan sasaran RPJMN 2020-2024.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan terus berusaha melakukan optimalisasi, dengan memanfaatkan sumberdaya

eksisting yang dimiliki, berlandaskan pembangunan berpusat pada kepentingan dan kebutuhan, hajat hidup masyarakat (*People Centered Development*), yang dikelola secara partisipatif bersama pemerintah, masyarakat dan swasta (Non Government Organization/NGO) melalui prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Beberapa pola seperti inilah yang relevan untuk diterapkan dan mampu mengakomodir berbagai permasalahan di masyarakat, apalagi kondisi SDM lini lapangan yang semakin berkurang. Sebagai sasaran jangka panjang diharapkan masyarakatlah sebagai ujung tombak pergerakan Program Bangga Kencana.

Berdasarkan data Tahun 2020, sumberdaya manusia eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, terdiri dari: 1) PPKBD = 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) orang; 2) Sub PPKBD = 3.585 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima) orang; 3) TOMA dan TOGA sejumlah 1.623 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga) orang. Namun jika ditinjau dari segi partisipasi swasta dalam pergerakan Program KKB di Kabupaten Malang, masih tergolong kecil kontribusinya dan masih terbatas pada pelayanan KB Klinik Swasta = 50 (Lima Puluh) klinik, Dokter Praktek Swasta = 36 (Tiga Puluh Enam) orang, Bidan Praktek Swasta = 262 (Dua Ratus Enam Puluh Dua) orang, sedangkan partisipasi untuk kegiatan KIE masih sangat kurang. Partisipasi swasta perlu terus dibangun, sehingga tidak terbatas hanya pada pelayanan KB saja, namun juga berpartisipasi dalam kegiatan KIE Program Bangga Kencana.

### **Tantangan dan Peluang**

#### a) TANTANGAN

1. Tingginya *Unmet Need*, yang disebabkan oleh tingginya perkawinan usia muda (<20 tahun bagi wanita); rendahnya kesertaan ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), rendahnya kesertaan KB Pria dan tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB;
2. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif terhadap masyarakat melalui berbagai media, yang berdampak pada terhambatnya keberhasilan Program Bangga Kencana;
3. Masih tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera.

4. Rendahnya kualitas IMP akibat sering terjadi pergantian PPKBD dan Sub PPKBD dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Program Bangga Kencana.

b) PELUANG

1. Adanya Sumberdaya Manusia eksternal pengelola Program Bangga Kencana (PPKBD, Sub PPKBD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) yang memadai;
2. Tersedianya tenaga dan tempat pelayanan KB yang memadai di setiap kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Semakin meningkatnya komitmen stakeholder, baik dari pemerintah dan swasta.

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah, disebabkan:
  - Rendahnya kualitas SDM pengelola pencatatan pelaporan, menurunnya frekuensi pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2. Masih rendahnya peserta KB MKJP, disebabkan:
  - Terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan KB Non MKJP dengan berbagai alasan baik bersifat medis dan non medis, berkurangnya KIE dan konseling KB MKJP.
3. Masih tingginya Perkawinan usia muda, disebabkan:
  - Masih adanya pandangan tradisional di masyarakat untuk kawin muda, derasnya arus informasi negatif melalui berbagai media (khususnya melalui media internet), masih kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi.
4. Masih rendahnya kualitas IMP (PPKBD & Sub PPKBD), disebabkan:
  - Munculnya pandangan bahwa Program Bangga Kencana merupakan urusan perempuan, sering terjadinya pergantian anggota IMP, rendahnya kualitas SDM IMP karena banyak yang berusia lanjut, menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan akibat berkurangnya tenaga PKB/PLKB.
5. Kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) rendah, disebabkan:
  - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pengelola kegiatan Bina Keluarga dan menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan.

Beberapa hal sebagai rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap tantangan dan peluang yang ada, yaitu:

1. Perlunya peningkatan pembinaan administrasi pencatatan dan pelaporan secara berkesinambungan, sekaligus diikuti monitoring dan evaluasi secara periodik.
2. Perlunya peningkatan kapasitas pembinaan dan pelayanan kepesertaan ber KB untuk diarahkan menjadi peserta KB MKJP, yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, khususnya bagi peserta KB Non MKJP. Hal ini disebabkan bahwa metode KB Non MKJP sangat rawan terjadinya kegagalan (kehamilan), yang berakibat meningkatnya angka Drop Out (putus menjadi peserta KB).
3. Peningkatan pembinaan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Program Bangga Kencana, yang dilaksanakan melalui pembinaan secara rutin dan berkesinambungan.
5. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 belum diterbitkan, sehingga belum bisa dilakukan analisa.

Tabel 2.3  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022**  
**KABUPATEN MALANG**

Kode	Rancangan Awal RKPd					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>2.208</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>					<b>13.684.263.000,00</b>	<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>18.460.118.686,00</b>
<b>2.208.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>2.459.666.000,00</b>	<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8.576.137.016,00</b>		
2.208.13.01.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4.000 buah	10.800.000,00	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 dokumen	60.000.000,00		
2.208.13.01.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	5.000.000,00	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	3 dokumen	20.602.000,00		
2.208.13.01.03	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPPKB	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	108 ob	1.732.870.000,00	2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	8.005.000,00		
2.208.13.01.04	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKB	4 Jumlah petugas kebersihan (OB)	-	-	2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	4.368.000,00		
2.208.13.01.05	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKB	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 jenis	128.850.000,00	2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	3.144.000,00		
2.208.13.01.06	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	DPPKB	6 Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	5 jenis	39.861.000,00	2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	3.960.000,00		
2.208.13.01.07	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 jenis	3.842.000,00	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen	9.574.000,00		
2.208.13.01.08	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	3.456.000,00	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	10.347.000,00		
2.208.13.01.09	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKB	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	550 hok	28.875.000,00	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	28 dokumen	6.858.531.016,00		
2.208.13.01.10	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB	10 Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke luar daerah (HOK)	157 hok	173.000.000,00	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama satu tahun	27 ob	4.775.855.686,00		
2.208.13.01.11	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPPKB	11 Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke dalam daerah (HOK)	299 hok	126.652.000,00	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN pelaksana tugas dalam satu tahun	82 ob	2.072.675.330,00		
2.208.13.01.12	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	29 kec	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	12 bulan	206.460.000,00	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan	12 dokumen	1.600.000,00		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.208.13.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>1.081.070.000,00</b>	2.14.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen	2.000.000,00	
2.208.13.02.01	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKB	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 jenis	132.300.000,00	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	3.400.000,00	
2.208.13.02.02	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKB	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	148.594.000,00	2.14.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	500.000,00	
2.208.13.02.03	3 Pengadaan Mebeleur	DPPKB	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	6 jenis	245.285.000,00	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	12 dokumen	2.000.000,00	
2.208.13.02.04	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKB	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	8.036.000,00	2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	500.000,00	
2.208.13.02.05	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	159 unit	84.370.000,00	<b>2.14.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>10.500.000,00</b>	
2.208.13.02.06	6 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	2 kec	6 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	2 unit	389.189.000,00	2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 dokumen	3.000.000,00	
2.208.13.02.07	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	29 kec	7 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	30 gedung	73.296.000,00	2.14.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	1 dokumen	3.000.000,00	
2.208.13.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>6.500.000,00</b>	2.14.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	8 ohk	1.500.000,00	
2.208.13.03.01	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPPKB	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	65 stel	6.500.000,00	2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen	1.000.000,00	
2.208.13.04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>50.000.000,00</b>	2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1.877 unit	1.000.000,00	
2.208.13.04.01	1 Pendidikan dan Pelatihan Forma	DPPKB	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	46 orang	50.000.000,00	2.14.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	150 unit	1.000.000,00	
2.208.13.05	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>70.000.000,00</b>	2.14.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>96.840.000,00</b>	
2.208.13.05.01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 buku	60.000.000,00	2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit	5.000.000,00	
2.208.13.05.02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPPKB	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	5.000.000,00	2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	92 stel	14.540.000,00	
2.208.13.05.03	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPPKB	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	5.000.000,00	2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen	2.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.208.13.06	<b>Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk</b>		<b>Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.840.275.000,00</b>	2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan	1 dokumen	1.500.000,00	
2.208.13.06.01	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	390 Des/Kel	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	51.515.000,00	2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	3.000.000,00	
2.208.13.06.02	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	33 kec	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	26.102.000,00	2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	46 orang	50.000.000,00	
2.208.13.06.03	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	33 kec	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	29.985.000,00	2.14.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	93 ohk	10.400.000,00	
2.208.13.06.04	4 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	DPPKB	4 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	87.120.500,00	2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	93 ohk	10.400.000,00	
2.208.13.06.05	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	DPPKB	5 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	65.419.500,00	<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>332.745.000,00</b>	
2.208.13.06.06	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	390 Des/Kel	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	2.212.160.000,00	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	6 buah	3.842.000,00	
2.208.13.06.07	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	DPPKB	7 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	259.439.000,00	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 buah	132.300.000,00	
2.208.13.06.08	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	DPPKB	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	108.534.000,00	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 buah	25.187.000,00	
2.208.13.07	<b>Program Pelayanan Keluarga Berencana</b>		<b>Persentase Peserta KB MKJP</b>	<b>40,00 %</b>	<b>1.992.992.000,00</b>	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar	3.456.000,00	
			<b>Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)</b>	<b>100,00 %</b>		2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan/material yang disediakan	70 buah	95.000.000,00	
2.208.13.07.01	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	33 kec	1 Jumlah peserta KB Aktif	343.625 akseptor	145.949.000,00	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	157 ohk	25.120.000,00	
2.208.13.07.02	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	33 kec	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3.800 orang	98.397.000,00	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	299 ohk	47.840.000,00	
2.208.13.07.03	3 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	33 kec	3 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	8.796.000,00	<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>992.594.000,00</b>	
2.208.13.07.04	4 Pembinaan Kesertaan ber KB	96 klinik	4 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	34.181 PUS	11.000.000,00	2.14.01.2.06.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit	250.000.000,00	
2.208.13.07.05	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	33 kec	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.800 orang	1.032.075.000,00	2.14.01.2.06.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel yang diadakan	6 unit	194.000.000,00	
2.208.13.07.06	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	96 klinik	6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	696.775.000,00	2.14.01.2.06.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	148.594.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.208.13.08	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase BKR Paripurna	62,26 %	1.748.167.500,00	2.14.01.2.06.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	1 unit	400.000.000,00	
			Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88,15 %		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	16.700.000,00	
			Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47,47 %		2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	96 ok	12.000.000,00	
2.208.13.08.01	1 Bina Ketahanan Remaja	33 kec	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	135.401.200,00	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening	4.700.000,00	
2.208.13.08.02	2 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	33 kec	2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.866 akseptor	68.543.900,00	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	208.227.000,00	
2.208.13.08.03	3 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	33 kec	3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	60.196.900,00	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	2 unit	10.000.000,00	
2.208.13.08.04	4 Bina Ketahanan Remaja (DAK)	21 kec	4 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	467.837.500,00	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	159 unit	84.370.000,00	
2.208.13.08.05	5 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	33 kec	5 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.866 akseptor	747.175.000,00	2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	3.500.000,00	
2.208.13.08.06	6 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	33 kec	6 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	269.013.000,00	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	11.525.000,00	
2.208.13.09	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana		Persentase PPKBD Mandiri	64,49 %	3.435.592.500,00	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	32 unit	81.332.000,00	
2.208.13.09.01	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	33 kec	1 Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	53.370.000,00	2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	17.500.000,00	
2.208.13.09.02	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	33 kec	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	360.772.000,00	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	1.000.000.000,00	
2.208.13.09.03	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	33 kec	3 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	50.000.000,00	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	8 dokumen	346.559.500,00	
2.208.13.09.04	4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	33 kec	4 Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	1.771.116.000,00	2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	20 dokumen	9.120.500,00	
2.208.13.09.05	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	33 kec	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	176.368.500,00	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK	1 dokumen	24.705.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.208.13.09.06	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	33 kec	6 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	1.023.966.000,00	2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Survei/Pendataan IPBK	- dokumen	-	
						2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi Survei/Pendataan IPMK	- desa	-	
						2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan SSK Jalur Formal	29 dokumen	32.242.000,00	
						2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelompok Pendidikan Kependudukan SSK Jalur Non Formal	5 dokumen	22.000.000,00	
						2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	19 paket materi	27.560.900,00	
						2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	5 paket materi	13.784.500,00	
						2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SSK yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi Pendidikan Kependudukan	24 sekolah	35.000.000,00	
						2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah satuan pendidikan yang terimplementasi Pendidikan Kependudukan	24 kelompok	9.000.000,00	
						2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan yang ter Implementasi Pendidikan Kependudukan	5 kelompok	13.784.500,00	
						2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Advokasi Kajian Dampak Kependudukan serta Solusi Strategi	30 lembaga	30.000.000,00	
						2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Sosialisasi Dampak Kependudukan beserta model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	30 lembaga	30.000.000,00	
						2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PLKB/PKB yang mengikuti Sarasehan Pemutakhiran Data Keluarga	33 kecamatan	50.000.000,00	
						2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lintas Program yang mengikuti Rapat Program Bangsa Kencana	22 orang	49.362.100,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Parameter</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>653.440.500,00</b>	
						2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan	1 dokumen	1.000.000,00	
						2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kependudukan	1 dokumen	108.534.000,00	
						2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Profil KKBPK (Bangga Kencana)	1 dokumen	16.021.500,00	
						2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	33 dokumen	1.000.000,00	
						2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan	1 dokumen	1.000.000,00	
						2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Strategis Dampak Kependudukan	33 dokumen	1.000.000,00	
						2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan	1 dokumen	1.000.000,00	
						2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Terbentuknya Rumah Data Di Kampung KB	3 rumah data	90.000.000,00	
						2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga	33 kecamatan	15.000.000,00	
						2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	33 kecamatan	20.000.000,00	
						2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	390 dokumen	371.885.000,00	
						2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan data Keluarga dan KB	33 kecamatan	1.000.000,00	
						2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	33 dokumen	1.000.000,00	
						2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	33 kecamatan	25.000.000,00	
						2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Persentase Unmetneed</b>	<b>10,68 %</b>	<b>7.883.981.670,00</b>	
						2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK</b>	<b>1.202 orang</b>	<b>2.243.900.500,00</b>	
						2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Stakeholder dan mitra kerja yang teradvokasi Program KKBPK	5 lembaga	50.000.000,00	
						2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Desa Kampung KB yang tersosialisasinya KIE sesuai kearifan budaya lokal	10 desa	50.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Sarana KIE Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB	31 Balai Penyuluhan KB	176.368.500,00	
						2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang yang mendukung Promosi dan KIE Program KKBPK	3 lembaga	49.280.000,00	
						2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersosialisasikan Program KKBPK melalui Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5 jenis	28.901.000,00	
						2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Adanya Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait Program KKBPK (Bangga Kencana)	33 kecamatan	50.000.000,00	
						2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional dan sarana balai penyuluhan	33 kecamatan	1.756.760.000,00	
						2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya evaluasi pengendalian program di balai penyuluhan	33 dokumen	82.591.000,00	
						<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>		<b>Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK</b>	<b>1.212 orang</b>	<b>1.824.486.000,00</b>	
						2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IMP yang mendapat pembinaan PKB/PLKB	273 orang	354.000.000,00	
						2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana PLKB KIT	33 barang	103.882.000,00	
						2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas PLKB	33 orang	53.370.000,00	
						2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kemampuan 6 Peran Bhakti IMP	3.831 orang	1.313.234.000,00	
						<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani</b>	<b>6.696 akseptor</b>	<b>2.806.992.000,00</b>	
						2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendistribusian alokon ke faskes	94 faskes	305.571.000,00	
						2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah petugas pengelola logistik alokon untuk peningkatan kompetensi	2 orang	5.000.000,00	
						2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kesertaan KB MKJP	123.738 akseptor	45.789.000,00	
						2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah akseptor yang mengalami komplikasi dan kegagalan kontrasepsi	10 akseptor	3.750.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon)	12 dokumen	195.000.000,00	
						2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah faskes sebagai tempat pelayanan yang mempunyai alat penunjang yang mencukupi	16 faskes	1.025.000.000,00	
						2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah akseptor KB yang dibina pasca pelayanan	148.193 akseptor	837.408.000,00	
						2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah akseptor MKJP yang mendapat Informed Consent	123.738 akseptor	194.667.000,00	
						2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kesertaan KB Baru	3.187 calon akseptor	60.000.000,00	
						2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga pelayanan KB dan KR untuk peningkatan kompetensi	20 orang	80.000.000,00	
						2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan pelayanan KB bergerak	4 kecamatan	5.000.000,00	
						2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PUS pasca persalinan dan pasca Keguguran yang ikut KB	15.000 akseptor	38.397.000,00	
						2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah akseptor KB MOP	20 akseptor	11.410.000,00	
						<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK</b>	<b>9 lembaga</b>	<b>1.008.603.170,00</b>	
						2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Terbentuknya Kelompok KB yang ada di Kampung KB	128 kelompok	11.000.000,00	
						2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lintas sektor terintegrasi di kampung KB	12 lembaga	385.800.000,00	
						2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Musyawarah Pokja Kampung KB	64 dokumen	300.900.000,00	
						2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB aktif	3 Kampung KB	310.903.170,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB</b>	<b>80,00 %</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	
						2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga</b>	<b>2.139 kelompok</b>	<b>810.622.200,00</b>	
						2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberda	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok BKR yang terbentuk	5 kelompok	5.000.000,00	
									Jumlah Kelompok PIK-R yang terbentuk	5 kelompok	5.000.000,00	
									Jumlah Kelompok BKB yang terbentuk	5 kelompok	5.000.000,00	
									Jumlah Kelompok BKL yang terbentuk	5 kelompok	5.000.000,00	
									Jumlah Kelompok UPPKS yang terbentuk	5 kelompok	5.000.000,00	
						2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)	10 kelompok	80.000.000,00	
									Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB dan BKL)	10 kelompok	94.426.750,00	
						2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelola yang mendapatkan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33 orang	12.500.000,00	
						2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok PIK-R yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	33 kelompok	63.918.750,00	
									Jumlah Kelompok BKR yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	33 kelompok	63.918.750,00	
									Jumlah Kelompok UPPKS yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	33 kelompok	63.918.750,00	
						2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Kelompok BKR/PIK-R yang mendapatkan pelatihan	310 orang	80.000.000,00	
									Jumlah Kader Kelompok BKB/BKL yang mendapatkan pelatihan	310 orang	80.000.000,00	
						2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok BKR/PIK-R aktif	33 kelompok	20.000.000,00	
									Jumlah Kelompok BKB aktif	33 kelompok	20.000.000,00	
									Jumlah Kelompok BKL aktif	33 kelompok	20.000.000,00	
									Jumlah Kelompok UPPKS aktif	33 kelompok	20.000.000,00	
						2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok BKB yang mendapatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	33 kelompok	53.543.900,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok PIK Remaja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Kerja	15 kelompok	88.198.400,00	
						2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Rapat (Notulen) Koordinasi	2 dokumen	5.000.000,00	
						2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Materi IPK yang tersedia	1 buah	2.500.000,00	
						2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Advokasi dan Promosi IPK	1 kelompok	5.000.000,00	
						2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil kegiatan sosialisasi IPK	1 dokumen	10.196.900,00	
						2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian IPK yang tersusun	2 dokumen	2.500.000,00	
						<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>126 lembaga</b>	<b>189.377.800,00</b>	
						2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mitra Kerja yang berperan dalam Penanganan Kelompok BKB Lokus Stunting	10 Desa Lokus Stunting	127.175.000,00	
						2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mitra kerja dan ormas yang berperan aktif dalam Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 lembaga	15.000.000,00	
						2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR dan PIK R)	33 kelompok	32.202.800,00	
						2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mitra Kerja Kelompok UPPKS yang mendapatkan Sosialisasi dan Promosi	4 lembaga	15.000.000,00	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penjaringan permasalahan Program Bangga Kencana, dilaksanakan melalui media Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Berbagai usulan masyarakat yang terhimpun, dijadikan sebagai bahan analisa dan sebagai program prioritas pembangunan Program Bangga Kencana. Mekanisme penjaringan usulan masyarakat, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga pada tingkat kabupaten, yang dihadiri oleh perwakilan berbagai elemen masyarakat, antara lain: (1) Kelompok Keluarga Miskin; (2) Kelompok Perempuan; (3) Kelompok Pemuda; (4) Toma dan Toga; (5) Kader KB dan Kesehatan; (6) Kelompok Tani; (7) Kelompok Wirausaha; (8) LSM dan LSOM; (9) Kelompok profesi yang lain.

Proses pengumpulan usulan masyarakat dimulai dari tingkat paling dasar, yang diawali dari forum-forum tingkat RT. Untuk selanjutnya, usulan tersebut diajukan pada Musrenbang tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga pada Musrenbang tingkat Kabupaten yang dikemas dalam aplikasi Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut, selanjutnya dipilah-pilah dan diformulasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dijadikan program prioritas.

Berdasarkan data yang terkumpul dalam aplikasi SIPD - Musrenbang Kabupaten Tahun 2022, muncul usulan Program Bangga Kencana dari masyarakat. Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya tergantung pada aplikasi tersebut, namun penjaringan permasalahan juga diambil dari forum konsultasi PPLKB (Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Berbagai isu-isu strategis Program Bangga Kencana, yaitu: (1) Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun); (2) Masih tingginya Drop Out KB; (3) masih rendahnya kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD); (4) Masih rendahnya kualitas kegiatan kelompok Tri Bina Keluarga (BKB, BKR dan BKL); (5) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS. Kelima permasalahan itulah yang selama ini menjadi penghambat, sekaligus sebagai tantangan pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Tabel 2.4  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT  
 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022**

No.	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KUSNADI	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok UPPKS dalam Promosi Usaha Ekonomi Produktif	25 Orang / 2 Kali Kegiatan	Promosi produk unggulan kurang maksimal (pelatihan tata cara pembuatan kemasan produk, pemasaran produk, dan pengadaan bantuan tenda stand untuk pameran UMKM)	Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kab. Malang	
2	MUFLID FARID	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan Promosi Program GenRe (melalui PIK-R dan BKR)	50 Orang / 1 Kali Kegiatan	Minimnya pengetahuan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja	RT. 01/RW. 01 Dusun Kalangan Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kab. Malang	
3	SRIYONO	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Promosi dan KIE 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga (melalui Kelompok BKB) dan Penanganan Stunting - Edukasi Pengasuhan 1000 HPK (Wilayah Lokus Stunting)	50 Orang / 1 Kali Kegiatan	Sosialisasi tentang kesehatan Ibu dan anak terkait ibu hamil resiko tinggi, gizi buruk anak dan KB	Balai Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang	
4	BAMBANG SOPONYONO	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok UPPKS dalam Promosi Usaha Ekonomi Produktif	25 Orang / 2 Kali Kegiatan	Kurangnya pengetahuan dalam bidang marketing	Dusun Krajan Selorejo Kecamatan Dau Kab. Malang	
5	SAMSULIADI	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan Promosi Program GenRe (melalui PIK-R dan BKR)	50 Orang / 1 Kali Kegiatan	Meningkatnya Pernikahan Dini	Dusun Putukrejo, Dusun Bendosari, Dusun Kapatihan, Dusun Lebaksari Desa Kapatihan Kecamatan Tirtoyudo Kab. Malang	

Tabel 2.4 menjelaskan adanya usulan program dan kegiatan masyarakat yang terangkum dalam usulan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2022, yang terdiri dari 5 (lima) usulan dari 5 (lima) desa dari kecamatan yang berbeda yaitu sejumlah Rp.52.258.000,00. Adapun rincian kegiatan beserta anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok UPPKS dalam Promosi Usaha Ekonomi Produktif, usulan dari desa Ngadirejo, kecamatan Kromengan, dengan anggaran sejumlah Rp.11.288.000,00;
2. Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan Promosi Program GenRe (melalui PIK-R dan BKR), usulan dari Dusun Kalangan, Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, dengan anggaran sejumlah Rp.9.894.000,00;
3. Sosialisasi Promosi dan KIE 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga (melalui Kelompok BKB) dan Penanganan Stunting - Edukasi Pengasuhan 1000 HPK (Wilayah Lokus Stunting), usulan dari Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, dengan anggaran sejumlah Rp.9.894.000,00;
4. Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok UPPKS dalam Promosi Usaha Ekonomi Produktif usulan dari Dusun Krajan, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, dengan anggaran sejumlah Rp.11.288.000,00; dan
5. Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan Promosi Program GenRe (melalui PIK-R dan BKR) usulan dari Dusun Putukrejo, Dusun Bendosari, Dusun Kepatihan, Dusun Lebaksari Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo, dengan anggaran sejumlah Rp.9.894.000,00.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 membeikan mandat kepada BKKBN untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/ Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP : Kesejahteraan Sosial.
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP : Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, secara umum adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kelahiran. Sedangkan tujuan khusus dari Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2022, adalah “Menekan angka pertumbuhan penduduk”.

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, adalah “Menurunnya Angka Kelahiran Total”.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program kerja Tahun 2022 lebih diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan Program Bangga Kencana. Sebagai penopang tujuan tersebut, implementasi kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu dengan mengalokasikan anggaran program/kegiatan secara tepat dan proporsional, berdasarkan tingkat prioritas permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2022 untuk mendukung Program Bangga Kencana, serta perkiraan pelaksanaan program/kegiatan serta rencana penganggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Took Ukur		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
2	14	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	3 dokumen	10 dokumen	100,00 %	20.602.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	22.500.000,00
2	14	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	8.005.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	8.800.000,00
2	14	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	4.368.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	4.800.000,00
2	14	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	3.144.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	3.500.000,00
2	14	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	3.960.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	4.500.000,00
2	14	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 dokumen	10 dokumen	100,00 %	9.574.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	10.500.000,00
2	14	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	10.347.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	11.300.000,00
<b>2 14 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																			
2	14	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama satu tahun	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	27 ob	28 dokumen	100,00 %	4.775.855.686,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	5.253.441.000,00
2	14	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah ASN pelaksana tugas dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	82 ob	28 dokumen	100,00 %	2.072.675.330,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	3.170.000.000,00
2	14	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	12 dokumen	28 dokumen	100,00 %	1.600.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	1.760.000,00
2	14	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	2.000.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	1.250.000,00
2	14	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	3.400.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	4.840.000,00
2	14	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	500.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	750.000,00
2	14	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	12 dokumen	28 dokumen	100,00 %	2.000.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	6.600.000,00
2	14	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	500.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	550.000,00
<b>2 14 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																			
2	14	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pembelian barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan terdministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 dokumen	3 dokumen	100,00 %	3.000.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	3.500.000,00
2	14	1	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan terdministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	3 dokumen	100,00 %	3.000.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	3.500.000,00
2	14	1	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan terdministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	8 shk	3 dokumen	100,00 %	1.500.000,00	DAU	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	2.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja							
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target					
																	8	9	10	11	12
2	14	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1	1 dokumen	3 dokumen	100,00 %	1.000.000,00	DAU	14	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	1.250.000,00
2	14	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah barang pada perangkat daerah yang diketola dan teradministrasi dengan benar	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1.877	unit	3 dokumen	100,00 %	1.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	1.250.000,00
2	14	1	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	150	unit	3 dokumen	100,00 %	1.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	1.250.000,00
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>96.840.000,00</b>						<b>122.990.000,00</b>
2	14	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1	unit	3 dokumen	100,00 %	5.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	5.500.000,00
2	14	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	92	stel	3 dokumen	100,00 %	14.540.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	32.200.000,00
2	14	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1	dokumen	3 dokumen	100,00 %	2.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	2.200.000,00
2	14	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1	dokumen	3 dokumen	100,00 %	1.500.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	1.650.000,00
2	14	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1	dokumen	3 dokumen	100,00 %	3.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	3.500.000,00
2	14	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	46	orang	3 dokumen	100,00 %	50.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	55.000.000,00
2	14	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	93	ohk	3 dokumen	100,00 %	10.400.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	11.500.000,00
2	14	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	93	ohk	3 dokumen	100,00 %	10.400.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	11.440.000,00
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>332.745.000,00</b>						<b>403.764.000,00</b>
2	14	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	6	buah	1 dokumen	100,00 %	3.842.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	4.226.000,00
2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	4	buah	1 dokumen	100,00 %	132.300.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	145.530.000,00
2	14	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5	buah	1 dokumen	100,00 %	25.187.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	27.706.000,00
2	14	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2	eksemplar	1 dokumen	100,00 %	3.456.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	3.802.000,00
2	14	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah bahan/material yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	70	buah	1 dokumen	100,00 %	95.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	104.500.000,00
2	14	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	157	ohk	1 dokumen	100,00 %	25.120.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	28.000.000,00
2	14	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	299	ohk	1 dokumen	100,00 %	47.840.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	90.000.000,00
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintahan Daerah</b>											<b>992.594.000,00</b>						<b>1.091.900.000,00</b>
2	14	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1	unit	1 dokumen	100,00 %	250.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	275.000.000,00
2	14	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	6	unit	1 dokumen	100,00 %	194.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	213.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
214120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	3 unit	1 dokumen	100,00 %	148.594.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	163.500.000,00
214120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 unit	1 dokumen	100,00 %	400.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	440.000.000,00
2141208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>16.700.000,00</b>					<b>245.800.000,00</b>
214120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	96 ok	1 dokumen	100,00 %	12.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	13.200.000,00
214120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	36 rekening	1 dokumen	100,00 %	4.700.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	232.600.000,00
2141209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>208.227.000,00</b>					<b>240.300.000,00</b>
214120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 unit	1 dokumen	100,00 %	10.000.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	22.000.000,00
214120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	159 unit	1 dokumen	100,00 %	84.370.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	92.807.000,00
214120905	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	10 unit	1 dokumen	100,00 %	3.500.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	3.850.000,00
214120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	11 unit	1 dokumen	100,00 %	11.525.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	12.678.000,00
214120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	32 unit	1 dokumen	100,00 %	81.332.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	89.465.000,00
214120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 unit	1 dokumen	100,00 %	17.500.000,00	DAU		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	19.500.000,00
2142	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>										<b>1.000.000.000,00</b>					<b>3.917.193.000,00</b>
21402201	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah</b>										<b>346.559.500,00</b>					<b>337.593.000,00</b>
2140220101	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKB/KKBPK)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	20 dokumen	8 dokumen	1,96 %	9.120.500,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	5.473.000,00
2140220102	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	8 dokumen	1,96 %	24.705.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	24.705.000,00
2140220103	Dukungan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Survei/Pendataan IPBK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	- dokumen	8 dokumen	1,96 %	-	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	-
2140220104	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (390 Desa)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi Survei/Pendataan IPMK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	- desa	8 dokumen	1,96 %	-	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	-
2140220105	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Pendidikan Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan SSK Jujur Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	29 dokumen	8 dokumen	1,96 %	32.242.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	32.242.000,00
2140220106	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Pendidikan Non Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penguatan Kelompok Pendidikan Kependudukan SSK Jujur Non Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 dokumen	8 dokumen	1,96 %	22.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	22.000.000,00
2140220107	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jujur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jujur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	19 paket materi	8 dokumen	1,96 %	27.560.900,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	16.541.400,00
2140220108	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jujur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jujur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 paket materi	8 dokumen	1,96 %	13.784.500,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	13.784.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja						
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Took Ukur		Target				
																	8	9	10	11
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah SSK yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	24 sekolah	8 dokumen	1,96 %	35.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	43.700.500,00
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah satuan pendidikan yang terimplementasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	24 kelompok	8 dokumen	1,96 %	9.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	6.000.000,00
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 kelompok	8 dokumen	1,96 %	13.784.500,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	13.784.500,00
2	14	02	2.01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Advokasi Kajian Dampak Kependudukan serta Solusi Strategi	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	30 lembaga	8 dokumen	1,96 %	30.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	30.000.000,00
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Sosialisasi Dampak Kependudukan beserta model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	30 lembaga	8 dokumen	1,96 %	30.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	30.000.000,00
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Saran-saran Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah PLKB/PKB yang mengikuti Saran-saran Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	8 dokumen	1,96 %	50.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	50.000.000,00
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lintas Program yang mengikuti Rapat Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	22 orang	8 dokumen	1,96 %	49.362.100,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	49.362.100,00
2	14	02	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>653.440.500,00</b>						<b>3.579.600.000,00</b>
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	20.000.000,00
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	108.534.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	120.000.000,00
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Profil KKBPK (Bangsa Kencana)	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	16.021.500,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	20.000.000,00
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	20.000.000,00
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	20.000.000,00
2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kajian Strategis Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	2.000.000,00
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	-
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Terbentuknya Rumah Data Di Kampung KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	3 rumah data	12 dokumen	1,96 %	90.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	120.000.000,00
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	15.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	20.000.000,00
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	20.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	25.000.000,00
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	390 dokumen	12 dokumen	1,96 %	371.885.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	3.147.600.000,00
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan data Keluarga dan KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	20.000.000,00
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU		Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target
214021204	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk Berencana (KB)	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan dan Penguasaan Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	25.000.000,00	DAU	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100,00 %	25.000.000,00	
21403	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>										<b>7.883.981.670,00</b>				<b>8.754.465.000,00</b>	
2143201	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>										<b>2.243.900.500,00</b>				<b>617.712.000,00</b>	
21432011	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Unmetneed	Stakeholder dan mitra kerja yang teradvokasi Program KKBPK	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	5 lembaga	1.202 orang	1,96 %	50.000.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	57.500.000,00	
21432012	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Unmetneed	Desa Kampung KB yang tersosialisasinya KIE sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	10 desa	1.202 orang	1,96 %	50.000.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	57.500.000,00	
21432013	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase Unmetneed	Terpenuhinya Sarana KIE Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	31 Balai Penyuluhan KB	1.202 orang	1,96 %	176.368.500,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	202.824.000,00	
21432014	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Persentase Unmetneed	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang yang mendukung Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3 lembaga	1.202 orang	1,96 %	49.280.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	56.672.000,00	
21432015	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Penceritaan Program KKBPK	Persentase Unmetneed	Tersosialisasi Program KKBPK melalui Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	5 jenis	1.202 orang	1,96 %	28.901.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	33.236.000,00	
21432016	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitlok)	Persentase Unmetneed	Adanya Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait Program KKBPK (Bangga Kencana)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 kecamatan	1.202 orang	1,96 %	50.000.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	57.500.000,00	
21432017	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Persentase Unmetneed	Tersedianya operasional dan sarana balai penyuluhan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 kecamatan	1.202 orang	1,96 %	750.000.000,00 1.006.700.000,00	DAK Fisik DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	57.500.000,00	
21432018	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Unmetneed	Terlaksananya evaluasi pengendalian program di balai penyuluhan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 dokumen	1.202 orang	1,96 %	82.591.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	94.980.000,00	
2143202	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>										<b>1.824.486.000,00</b>				<b>2.098.159.000,00</b>	
21432021	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Unmetneed	Jumlah IMP yang mendapat pembinaan PKB/PLKB	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	273 orang	1.212 orang	1,96 %	354.000.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	407.100.000,00	
21432022	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase Unmetneed	Tersedianya Sarana PLKB KIT	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 barang	1.212 orang	1,96 %	103.882.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	119.464.000,00	
21432023	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Unmetneed	Peningkatan Kapasitas PLKB	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 orang	1.212 orang	1,96 %	53.370.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	61.376.000,00	
21432024	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Unmetneed	Meningkatnya Kemampuan 6 Peran Bhakti IMP	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3.831 orang	1.212 orang	1,96 %	1.313.234.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	1.510.219.000,00	
21403203	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>2.806.992.000,00</b>				<b>4.790.883.000,00</b>	
2140320301	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Unmetneed	Jumlah pendistribusian alokasi ke faskes	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	94 faskes	6.696 akseptor	1,96 %	305.571.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	305.571.000,00	
2140320302	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Unmetneed	Jumlah petugas pengelola logistik alokasi untuk peningkatan kompetensi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	2 orang	6.696 akseptor	1,96 %	5.000.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	5.000.000,00	
2140320303	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Unmetneed	Jumlah kesertaan KB MKJP	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	123.738 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	45.789.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	2.672.741.000,00	
2140320304	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Kontrasepsi	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor yang mengalami komplikasi dan kegagalan kontrasepsi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	10 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	3.750.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	3.750.000,00	
2140320305	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Unmetneed	Jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokasi)	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	12 dokumen	6.696 akseptor	1,96 %	195.000.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	27.539.000,00	
2140320306	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Unmetneed	Jumlah faskes sebagai tempat pelayanan yang mempunyai alat penunjang yang mencukupi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	16 faskes	6.696 akseptor	1,96 %	825.000.000,00 200.000.000,00	DAK Fisik DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	228.150.000,00	
2140320307	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor KB yang dibina pasca pelayanan	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	148.193 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	837.408.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	837.408.000,00	
2140320308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor MKJP yang mendapat Informed Consent	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	123.738 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	194.667.000,00	DAK non Fisik	Persentase Unmetneed	10,51 %	194.667.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2140320309	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Unmetneed	Jumlah kesertaan KB Baru	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3.187 calon akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	60.000.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	60.000.000,00
2140320310	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Unmetneed	Jumlah tenaga pelayanan KB dan KR untuk peningkatan kompetensi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	20 orang	6.696 akseptor	1,96 %	80.000.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	400.000.000,00
2140320311	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Unmetneed	Jumlah kegiatan pelayanan KB bergerak	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	4 kecamatan	6.696 akseptor	1,96 %	5.000.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	6.250.000,00
2140320312	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Unmetneed	Jumlah PUS pasca persalinan dan pasca Keguguran yang ikut KB	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	15.000 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	38.397.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	38.397.000,00
2140320313	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor KB MOP	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	20 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	11.410.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	11.410.000,00
<b>21403204</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>										<b>1.008.603.170,00</b>					<b>1.247.911.000,00</b>
214032041	Penggiatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Unmetneed	Jumlah Terbenutnya Kelompok KB yang ada di Kampung KB	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	128 kelompok	9 lembaga	1,96 %	11.000.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	12.650.000,00
214032042	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Unmetneed	Lintas sektor terintegrasi di kampung KB	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	12 lembaga	9 lembaga	1,96 %	385.800.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	443.670.000,00
214032043	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Unmetneed	Jumlah Dokumen Hasil Musyawarah Pokja Kampung KB	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	64 dokumen	9 lembaga	1,96 %	300.900.000,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	346.035.000,00
214032044	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Unmetneed	Jumlah Kampung KB aktif	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3 Kampung KB	9 lembaga	1,96 %	310.903.170,00	DAK non Fisik		Persentase Unmetneed	10,51 %	445.356.000,00
<b>21404</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>										<b>1.000.000.000,00</b>					<b>1.922.985.000,00</b>
<b>21404201</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>										<b>810.622.200,00</b>					<b>1.604.669.000,00</b>
2140420101	Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok BKR yang terbentuk Jumlah Kelompok PIK-R yang terbentuk Jumlah Kelompok BKB yang terbentuk Jumlah Kelompok BKL yang terbentuk Jumlah Kelompok UPPKS yang terbentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
2140420102	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	10 kelompok 10 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	80.000.000,00 94.426.750,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	110.000.000,00 198.000.000,00
2140420103	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Pengelola yang mendapatkan Pelatihan Teknis Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 orang	2.139 kelompok	1,96 %	12.500.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	13.750.000,00
2140420104	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok PIK-R yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan Jumlah Kelompok BKR yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan Jumlah Kelompok UPPKS yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok 33 kelompok 33 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	63.918.750,00 63.918.750,00 63.918.750,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	70.311.000,00 70.311.000,00 115.500.000,00
2140420105	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kader Kelompok BKR/PIK-R yang mendapatkan pelatihan Jumlah Kader Kelompok BKB/BKL yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	310 orang 310 orang	2.139 kelompok	1,96 %	80.000.000,00 80.000.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	134.750.000,00 148.500.000,00
2140420106	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok BKR/PIK-R aktif Jumlah Kelompok BKB aktif Jumlah Kelompok BKL aktif Jumlah Kelompok UPPKS aktif	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok 33 kelompok 33 kelompok 33 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	121.000.000,00 121.000.000,00 110.000.000,00 180.414.000,00

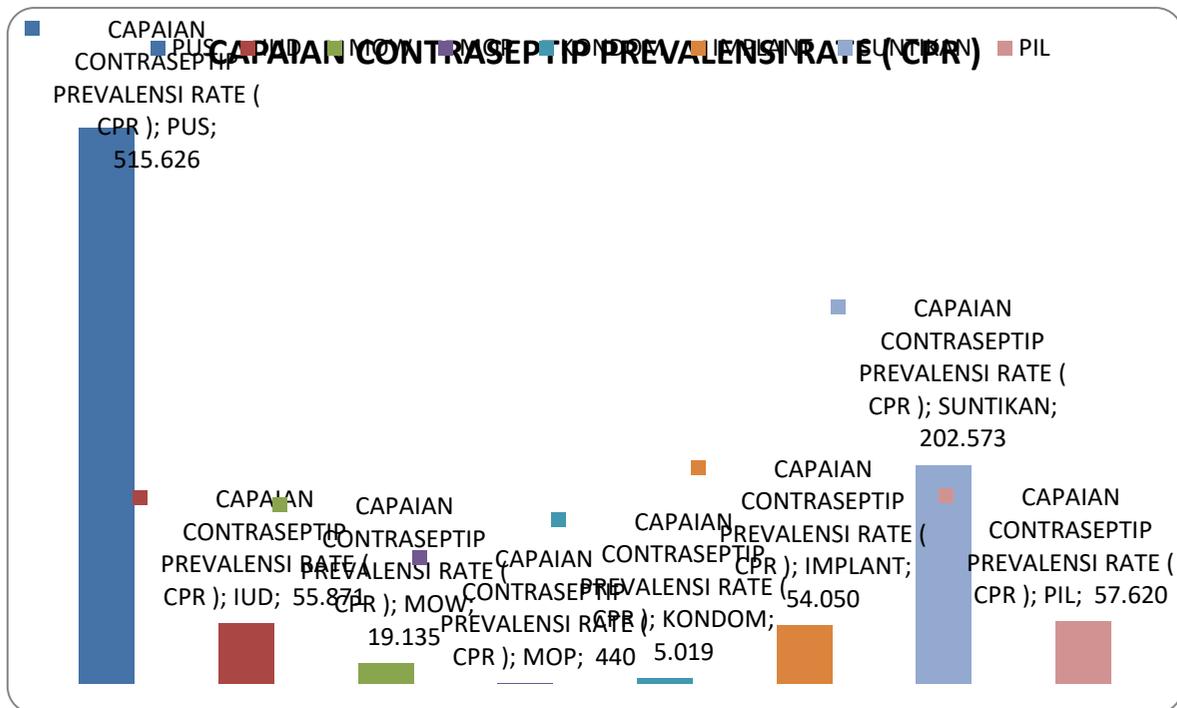
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPEKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok BKB yang mendapatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	53.543.900,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	58.898.000,00
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Penecelakaan Keuangan Keluarga)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok PIK Remaja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Kerja	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	15 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	88.198.400,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	97.018.000,00
2 14 04 2.01 09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Laporan Hasil Rapat (Notulen) Koordinasi	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	5.500.000,00
2 14 04 2.01 10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Materi IPK yang tersedia	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 buah	2.139 kelompok	1,96 %	2.500.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	2.750.000,00
2 14 04 2.01 11	Advokasi dan Promosi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	5.500.000,00
2 14 04 2.01 12	Sosialisasi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah dokumen hasil kegiatan sosialisasi IPK	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	10.196.900,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	11.217.000,00
2 14 04 2.01 13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian IPK yang tersusun	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	2.500.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	2.750.000,00
<b>2 14 04 2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>										<b>189.377.800,00</b>					<b>318.316.000,00</b>
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPEKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Mitra Kerja yang berperan dalam Penanganan Kelompok BKB Lokus Stunting	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	10 Desa Lokus Stunting	126 lembaga	1,96 %	127.175.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	249.893.000,00
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPEKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah mitra kerja dan ormas yang berperan aktif dalam Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 lembaga	126 lembaga	1,96 %	15.000.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	16.500.000,00
2 14 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPEKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR dan PIK R)	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok	126 lembaga	1,96 %	32.202.800,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	35.423.000,00
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Mitra Kerja Kelompok UPEKS yang mendapatkan Sosialisasi dan Promosi	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	4 lembaga	126 lembaga	1,96 %	15.000.000,00	DAU		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80,00 %	16.500.000,00

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tercantum dalam Tabel 3.1 diatas terdapat 4 (empat) usulan yang merupakan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang Kabupaten Malang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain memfasilitasi kegiatan hasil Musrebang Kabupaten Malang tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga akan mempertimbangkan kebutuhan terkait isu kesetaraan gender yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Demi mendukung terwujudnya kesetaraan gender tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan beberapa program/kegiatan mendatang. Adapun program/kegiatan yang menjadi perhatian dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
    - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
  - c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
    - Peningkatan Kesertaan KB Pria
  - d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3. Program Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
    - Advokasi dan Promosi IPK
    - Sosialisasi IPK
  - b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja



Jumlah kesertaan ber- KB di Kabupaten Malang pada akhir tahun 2020 dapat dilihat pada diagram diatas. Pada diagram, dijelaskan jenis metode kontrasepsi yang dipakai oleh akseptor. MOP dan Kondom merupakan alat kontrasepsi yang dipakai oleh pria, dimana jumlah kesertaan mencapai 5.459 akseptor atau sekitar 1,06 %. Persentase tersebut menunjukkan masih rendahnya kesertaan ber KB oleh pria dibandingkan kesertaan ber-KB oelh wanita yang mencapai 510.167 atau berkisar 98,94%. Diharapkan kedepan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan lebih mengaktikan peran serta penduduk pria di Kabupaten Malang untuk menjadi akseptor KB.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, didasarkan pada prioritas kebutuhan yang dialokasikan secara proporsional pada setiap program/kegiatan, sebagai berikut:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (46,46%)**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (0,33%);
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (37,15%);
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (0,06%);
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (0,53%);
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (1,80%);
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5,38%);
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (0,09);
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1,13%).

#### **B. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk (5,42%)**

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah (1,88%);
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (3,54%).

#### **C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (42,71%)**

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (12,16);
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (9,88%);
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (15,21%);

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (5,46%);

**D. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (5,42%)**

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (4,39);
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (1,03%).

Tabel 4.1  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022						Keterangan			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
2	14	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											18.460.118.686,00		
2	14	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											60.000.000,00	
2	14	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	3 dokumen	10 dokumen	100,00 %	20.602.000,00	DAU
2	14	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	8.005.000,00	DAU
2	14	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	4.368.000,00	DAU
2	14	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	3.144.000,00	DAU
2	14	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	3.960.000,00	DAU
2	14	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 dokumen	10 dokumen	100,00 %	9.574.000,00	DAU
2	14	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	10 dokumen	100,00 %	10.347.000,00	DAU
2	14	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											6.858.531.016,00	
2	14	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama satu tahun	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	27 ob	28 dokumen	100,00 %	4.775.855.686,00	DAU
2	14	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah ASN pelaksana tugas dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	82 ob	28 dokumen	100,00 %	2.072.675.330,00	DAU
2	14	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	12 dokumen	28 dokumen	100,00 %	1.600.000,00	DAU
2	14	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	2.000.000,00	DAU
2	14	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	3.400.000,00	DAU
2	14	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	500.000,00	DAU
2	14	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	12 dokumen	28 dokumen	100,00 %	2.000.000,00	DAU
2	14	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	28 dokumen	100,00 %	500.000,00	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2 14 1 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										<b>10.500.000,00</b>		
2 14 1 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 dokumen	3 dokumen	100,00 %	3.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	3 dokumen	100,00 %	3.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	8 ohk	3 dokumen	100,00 %	1.500.000,00	DAU	
2 14 1 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	3 dokumen	100,00 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1.877 unit	3 dokumen	100,00 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	150 unit	3 dokumen	100,00 %	1.000.000,00	DAU	
<b>2 14 1 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>96.840.000,00</b>		
2 14 1 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 unit	3 dokumen	100,00 %	5.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	92 stel	3 dokumen	100,00 %	14.540.000,00	DAU	
2 14 1 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	3 dokumen	100,00 %	2.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	3 dokumen	100,00 %	1.500.000,00	DAU	
2 14 1 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	3 dokumen	100,00 %	3.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	46 orang	3 dokumen	100,00 %	50.000.000,00	DAU	
2 14 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	93 ohk	3 dokumen	100,00 %	10.400.000,00	DAU	
2 14 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	93 ohk	3 dokumen	100,00 %	10.400.000,00	DAU	
<b>2 14 1 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>332.745.000,00</b>		
2 14 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	6 buah	1 dokumen	100,00 %	3.842.000,00	DAU	
2 14 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	4 buah	1 dokumen	100,00 %	132.300.000,00	DAU	
2 14 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 buah	1 dokumen	100,00 %	25.187.000,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Keterangan				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja										
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	14	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 eksemplar	1 dokumen	100,00 %	3.456.000,00	DAU	
2	14	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah bahan/material yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	70 buah	1 dokumen	100,00 %	95.000.000,00	DAU	
2	14	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	157 ohk	1 dokumen	100,00 %	25.120.000,00	DAU	
2	14	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	299 ohk	1 dokumen	100,00 %	47.840.000,00	DAU	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>992.594.000,00</b>		
2	14	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 unit	1 dokumen	100,00 %	250.000.000,00	DAU	
2	14	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	6 unit	1 dokumen	100,00 %	194.000.000,00	DAU	
2	14	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	3 unit	1 dokumen	100,00 %	148.594.000,00	DAU	
2	14	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 unit	1 dokumen	100,00 %	400.000.000,00	DAU	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>16.700.000,00</b>		
2	14	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	96 ok	1 dokumen	100,00 %	12.000.000,00	DAU	
2	14	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	36 rekening	1 dokumen	100,00 %	4.700.000,00	DAU	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>208.227.000,00</b>		
2	14	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 unit	1 dokumen	100,00 %	10.000.000,00	DAU	
2	14	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	159 unit	1 dokumen	100,00 %	84.370.000,00	DAU	
2	14	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	10 unit	1 dokumen	100,00 %	3.500.000,00	DAU	
2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	11 unit	1 dokumen	100,00 %	11.525.000,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 14 1 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	32 unit	1 dokumen	100,00 %	81.332.000,00	DAU	
2 14 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 unit	1 dokumen	100,00 %	17.500.000,00	DAU	
<b>2 14 2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>										<b>1.000.000.000,00</b>		
<b>2 14 02 2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah</b>										<b>346.559.500,00</b>		
2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	20 dokumen	8 dokumen	1,96 %	9.120.500,00	DAU	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDGP) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan GDGP	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	8 dokumen	1,96 %	24.705.000,00	DAU	
2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Survei/Pendataan IPBK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	- dokumen	8 dokumen	1,96 %	-	DAU	
2 14 02 2.01 04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (390 Desa)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi Survei/Pendataan IPMK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	- desa	8 dokumen	1,96 %	-	DAU	
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan SSK Jalur Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	29 dokumen	8 dokumen	1,96 %	32.242.000,00	DAU	
2 14 02 2.01 06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penguatan Kelompok Pendidikan Kependudukan SSK Jalur Non Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 dokumen	8 dokumen	1,96 %	22.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.01 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	19 paket materi	8 dokumen	1,96 %	27.560.900,00	DAU	
2 14 02 2.01 08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 paket materi	8 dokumen	1,96 %	13.784.500,00	DAU	
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah SSK yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	24 sekolah	8 dokumen	1,96 %	35.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah satuan pendidikan yang terimplementasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	24 kelompok	8 dokumen	1,96 %	9.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.01 11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan yang ter Implementasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 kelompok	8 dokumen	1,96 %	13.784.500,00	DAU	
2 14 02 2.01 12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Advokasi Kajian Dampak Kependudukan serta Solusi Strategi	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	30 lembaga	8 dokumen	1,96 %	30.000.000,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 14 02 2.01 13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Sosialisasi Dampak Kependudukan beserta model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	30 lembaga	8 dokumen	1,96 %	30.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.01 14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah PLKB/PKB yang mengikuti Sarasehan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	8 dokumen	1,96 %	50.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lintas Program yang mengikuti Rapat Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	22 orang	8 dokumen	1,96 %	49.362.100,00	DAU	
<b>2 14 02 2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>653.440.500,00</b>		
2 14 02 2.02 01	Perumusan Parameter Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	108.534.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Profil KKBPK (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	16.021.500,00	DAU	
2 14 02 2.02 04	Pemetaan Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kajian Strategis Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Terbentuknya Rumah Data Di Kampung KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	3 rumah data	12 dokumen	1,96 %	90.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	15.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	20.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	390 dokumen	12 dokumen	1,96 %	371.885.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan data Keluarga dan KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	25.000.000,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Keterangan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 14 03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>												
2 14 3	<b>2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>												
2 14 3 2.01 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Unmetneed	Stakeholder dan mitra kerja yang teradvokasi Program KKBPK	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	5 lembaga	1.202 orang	1,96 %	50.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.01 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Unmetneed	Desa Kampung KB yang tersosialisasinya KIE sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	10 desa	1.202 orang	1,96 %	50.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.01 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase Unmetneed	Terpenuhinya Sarana KIE Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	31 Balai Penyuluhan KB	1.202 orang	1,96 %	176.368.500,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.01 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Persentase Unmetneed	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang yang mendukung Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3 lembaga	1.202 orang	1,96 %	49.280.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.01 5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Persentase Unmetneed	Tersosialisasikan Program KKBPK melalui Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	5 jenis	1.202 orang	1,96 %	28.901.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.01 6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Unmetneed	Adanya Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait Program KKBPK (Bangga Kencana)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 kecamatan	1.202 orang	1,96 %	50.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.01 7	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Persentase Unmetneed	Tersedianya operasional dan sarana balai penyuluhan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 kecamatan	1.202 orang	1,96 %	750.000.000,00 1.006.760.000,00	DAK Fisik DAK non Fisik	
2 14 3 2.01 8	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Unmetneed	Terlaksananya evaluasi pengendalian program di balai penyuluhan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 dokumen	1.202 orang	1,96 %	82.591.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>												
2 14 3 2.02 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Unmetneed	Jumlah IMP yang mendapat pembinaan PKB/PLKB	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	273 orang	1.212 orang	1,96 %	354.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.02 2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase Unmetneed	Tersedianya Sarana PLKB KIT	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 barang	1.212 orang	1,96 %	103.882.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.02 3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Unmetneed	Peningkatan Kapasitas PLKB	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	33 orang	1.212 orang	1,96 %	53.370.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Unmetneed	Meningkatnya Kemampuan 6 Peran Bhakti IMP	Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3.831 orang	1.212 orang	1,96 %	1.313.234.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>												
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Unmetneed	Jumlah pendistribusian alokan ke faskes	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	94 faskes	6.696 akseptor	1,96 %	305.571.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Unmetneed	Jumlah petugas pengelola logistik alokan untuk peningkatan kompetensi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	2 orang	6.696 akseptor	1,96 %	5.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Unmetneed	Jumlah kesertaan KB MKJP	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	123.738 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	45.789.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor yang mengalami komplikasi dan kegagalan kontrasepsi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	10 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	3.750.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokan) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Unmetneed	Jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokan)	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	12 dokumen	6.696 akseptor	1,96 %	195.000.000,00	DAK non Fisik	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Unmetneed	Jumlah faskes sebagai tempat pelayanan yang mempunyai alat penunjang yang mencukupi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	16 faskes	6.696 akseptor	1,96 %	825.000.000,00 200.000.000,00	DAK Fisik DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor KB yang dibina pasca pelayanan	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	148.193 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	837.408.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor MKJP yang mendapat Informed Consent	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	123.738 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	194.667.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Unmetneed	Jumlah kesertaan KB Baru	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3.187 calon akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	60.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Unmetneed	Jumlah tenaga pelayanan KB dan KR untuk peningkatan kompetensi	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	20 orang	6.696 akseptor	1,96 %	80.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Unmetneed	Jumlah kegiatan pelayanan KB bergerak	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	4 kecamatan	6.696 akseptor	1,96 %	5.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Unmetneed	Jumlah PUS pasca persalinan dan pasca Keguguran yang ikut KB	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	15.000 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	38.397.000,00	DAK non Fisik	
2 14 03 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase Unmetneed	Jumlah akseptor KB MOP	Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	20 akseptor	6.696 akseptor	1,96 %	11.410.000,00	DAK non Fisik	
<b>2 14 3 2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>										<b>1.008.603.170,00</b>		
2 14 3 2.04 1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Unmetneed	Jumlah Terbentuknya Kelompok KB yang ada di Kampung KB	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	128 kelompok	9 lembaga	1,96 %	11.000.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.04 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Unmetneed	Lintas sektor terintegrasi di kampung KB	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	12 lembaga	9 lembaga	1,96 %	385.800.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.04 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Unmetneed	Jumlah Dokumen Hasil Musyawarah Pokja Kampung KB	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	64 dokumen	9 lembaga	1,96 %	300.900.000,00	DAK non Fisik	
2 14 3 2.04 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Unmetneed	Jumlah Kampung KB aktif	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,68 %	3 Kampung KB	9 lembaga	1,96 %	310.903.170,00	DAK non Fisik	
<b>2 14 04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>										<b>1.000.000.000,00</b>		
<b>2 14 04 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>										<b>810.622.200,00</b>		
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok BKR yang terbentuk Jumlah Kelompok PIK-R yang terbentuk Jumlah Kelompok BKB yang terbentuk Jumlah Kelompok BKL yang terbentuk Jumlah Kelompok UPPKS yang terbentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	DAU	
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)  Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB dan BKL)	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	10 kelompok  10 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	80.000.000,00  94.426.750,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Keterangan			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Pengelola yang mendapatkan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 orang	2.139 kelompok	1,96 %	12.500.000,00	DAU
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok PIK-R yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan Jumlah Kelompok BKR yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan Jumlah Kelompok UPPKS yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok 33 kelompok 33 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	63.918.750,00 63.918.750,00 63.918.750,00	DAU
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kader Kelompok BKR/PIK-R yang mendapatkan pelatihan Jumlah Kader Kelompok BKB/BKL yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	310 orang 310 orang	2.139 kelompok	1,96 %	80.000.000,00 80.000.000,00	DAU
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok BKR/PIK-R aktif Jumlah Kelompok BKB aktif Jumlah Kelompok BKL aktif Jumlah Kelompok UPPKS aktif	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok 33 kelompok 33 kelompok 33 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00	DAU
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok BKB yang mendapatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	53.543.900,00	DAU
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok PIK Remaja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Kerja	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	15 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	88.198.400,00	DAU
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Laporan Hasil Rapat (Notulen) Koordinasi	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00	DAU
2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Materi IPK yang tersedia	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 buah	2.139 kelompok	1,96 %	2.500.000,00	DAU
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00	DAU
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah dokumen hasil kegiatan sosialisasi IPK	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	10.196.900,00	DAU
2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian IPK yang tersusun	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	2.500.000,00	DAU
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>											<b>189.377.800,00</b>	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS/PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Mitra Kerja yang berperan dalam Penanganan Kelompok BKB Lokus Stunting	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	10 Desa Lokus Stunting	126 lembaga	1,96 %	127.175.000,00	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah mitra kerja dan ormas yang berperan aktif dalam Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 lembaga	126 lembaga	1,96 %	15.000.000,00	DAU	
2 14 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR dan PIK R)	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok	126 lembaga	1,96 %	32.202.800,00	DAU	
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Mitra Kerja Kelompok UPPKS yang mendapatkan Sosialisasi dan Promosi	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	4 lembaga	126 lembaga	1,96 %	15.000.000,00	DAU	

Dilihat dari tabel diatas bahwa dengan adanya pembagian proporsi alokasi anggaran pada setiap program/kegiatan, diharapkan dapat menunjang pencapaian target sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diukur berdasarkan pada 1 (satu) target indikator kinerja sasaran, yaitu : Angka Kelahiran Total (TFR).

Sedangkan untuk penjabaran target capaian kinerja dan rencana penyerapan anggaran tiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang pada Tahun 2021 per-triwulan secara terperinci dijelaskan pada tabel 4.2 berikut.





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Trilwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	I		II		III		IV		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
214120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 unit	1 dokumen	100,00 %	400.000.000,00	DAU	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
<b>2141208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>16.700.000,00</b>		<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>
214120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	96 ok	1 dokumen	100,00 %	12.000.000,00	DAU	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
214120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	36 rekening	1 dokumen	100,00 %	4.700.000,00	DAU	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>2141209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>208.227.000,00</b>		<b>4,17%</b>	<b>4,17%</b>	<b>47,50%</b>	<b>45,83%</b>	<b>35,83%</b>	<b>37,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>	
214120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	2 unit	1 dokumen	100,00 %	10.000.000,00	DAU	-	-	10,00%	-	40,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
214120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	159 unit	1 dokumen	100,00 %	84.370.000,00	DAU	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
214120905	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	10 unit	1 dokumen	100,00 %	3.500.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-	
214120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	11 unit	1 dokumen	100,00 %	11.525.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-	
214120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	32 unit	1 dokumen	100,00 %	81.332.000,00	DAU	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	
214120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 unit	1 dokumen	100,00 %	17.500.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-	
<b>2142</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>										<b>1.000.000.000,00</b>		<b>55,65%</b>	<b>55,65%</b>	<b>22,08%</b>	<b>22,08%</b>	<b>12,02%</b>	<b>12,02%</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,57%</b>	
<b>21402201</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah</b>										<b>346.559.500,00</b>		<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
2140220101	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKDFK)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	20 dokumen	8 dokumen	1,96 %	9.120.500,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2140220102	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	8 dokumen	1,96 %	24.705.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2140220103	Dukungan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pembangunan Berawasan Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Survei/Pendataan IPBK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	- dokumen	8 dokumen	1,96 %	-	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140220104	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (390 Desa)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi Survei/Pendataan IPMK	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	- desa	8 dokumen	1,96 %	-	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140220105	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan SSK Jalur Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	29 dokumen	8 dokumen	1,96 %	32.242.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-	-
2140220106	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Penguatan Kelompok Pendidikan Kependudukan SSK Jalur Non Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 dokumen	8 dokumen	1,96 %	22.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2140220107	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	19 paket materi	8 dokumen	1,96 %	27.560.900,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2140220108	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 paket materi	8 dokumen	1,96 %	13.784.500,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2140220109	Alokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan JenjangSD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah SSK yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitas Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	24 sekolah	8 dokumen	1,96 %	35.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Trilwulan (%)								Keterangan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	I		II		III		IV									
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp							
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah satuan pendidikan yang terimplementasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	24 kelompok	8 dokumen	1,96 %	9.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	16	17	18	19	20	21	-	-		
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan yang ter Implementasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 kelompok	8 dokumen	1,96 %	13.784.500,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Advokasi Kajian Dampak Kependudukan serta Solusi Strategi	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	30 lembaga	8 dokumen	1,96 %	30.000.000,00	DAU	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Sosialisasi Dampak Kependudukan beserta model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	30 lembaga	8 dokumen	1,96 %	30.000.000,00	DAU	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah PLKB/PKB yang mengikuti Sarasehan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	8 dokumen	1,96 %	50.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Lintas Program yang mengikuti Rapat Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	22 orang	8 dokumen	1,96 %	49.362.100,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>653.440.500,00</b>		<b>44,64%</b>	<b>44,64%</b>	<b>27,50%</b>	<b>27,50%</b>	<b>20,71%</b>	<b>20,71%</b>	<b>7,14%</b>	<b>7,14%</b>					
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	108.534.000,00	DAU	25,00%	25,00%	35,00%	35,00%	40,00%	40,00%	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Profil KKBPK (Bangsa Kencana)	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	16.021.500,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Kajian Strategis Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Terbentuknya Rumah Data Di Kampung KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	3 rumah data	12 dokumen	1,96 %	90.000.000,00	DAU	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	15.000.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	20.000.000,00	DAU	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	390 dokumen	12 dokumen	1,96 %	371.885.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan data Keluarga dan KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 dokumen	12 dokumen	1,96 %	1.000.000,00	DAU	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kecamatan yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Parameter	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	33 kecamatan	12 dokumen	1,96 %	25.000.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Trilwulan (%)								Keterangan		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	I		II		III		IV				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2140420108	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok PIK Remaja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Kerja	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	15 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	88.198.400,00	DAU	33,33%	33,33%	-	-	33,33%	33,33%	33,34%	33,34%		
2140420109	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Terwujudnya IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Laporan Hasil Rapat (Notulen) Koordinasi	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	50,00%		
2140420110	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Materi IPK yang tersedia	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 buah	2.139 kelompok	1,96 %	2.500.000,00	DAU	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-		
2140420111	Advokasi dan Promosi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 kelompok	2.139 kelompok	1,96 %	5.000.000,00	DAU	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-		
2140420112	Sosialisasi IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah dokumen hasil kegiatan sosialisasi IPK	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	1 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	10.196.900,00	DAU	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-		
2140420113	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah dokumen evaluasi pencapaian IPK yang tersusun	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 dokumen	2.139 kelompok	1,96 %	2.500.000,00	DAU	-	-	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%		
<b>21404202</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>										<b>189.377.800,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,83%</b>	<b>45,83%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>20,84%</b>	<b>20,84%</b>		
2140420201	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Mitra Kerja yang berperan dalam Penanganan Kelompok BKB Lokus Stunting	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	10 Desa Lokus Stunting	126 lembaga	1,96 %	127.175.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-		
2140420202	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah mitra kerja dan ormas yang berperan aktif dalam Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 lembaga	126 lembaga	1,96 %	15.000.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	50,00%		
2140420203	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR dan PIK R)	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	33 kelompok	126 lembaga	1,96 %	32.202.800,00	DAU	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,34%	33,34%		
2140420204	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	Jumlah Mitra Kerja Kelompok UPPKS yang mendapatkan Sosialisasi dan Promosi	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	4 lembaga	126 lembaga	1,96 %	15.000.000,00	DAU	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-	-		

Rincian target capaian kinerja dan rencana penyerapan anggaran tersebut berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi capaian program/kegiatan Tahun 2021. Pada target program/kegiatan yang dilaksanakan pada tribulan III sampai dengan IV, dikarenakan:

1. Realisasi anggaran terutama dengan sumber anggaran DAK baru bisa dilaksanakan bulan April, sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan kegiatan;
2. Proses pengumpulan data, karena data yang disajikan mencakup data selama tahun berjalan;
3. Adanya proses pengadaan yang harus dilalui sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan dari kegiatan.

Namun demi kelancaran kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan agar pencapaian target kinerja dapat tercapai sesuai yang direncanakan, maka beberapa kegiatan penunjang yang menggunakan sumber dana selain DAK dan kegiatan tanpa melalui proses pengadaan (Swakelola) tetap dilaksanakan mulai awal tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan perencanaan program/kegiatan pada pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan, yaitu: 1) Peningkatan kualitas data kependudukan dan keluarga berencana; 2) Peningkatan kualitas data basis kependudukan dan keluarga berencana; 3) Pendewasaan Usia Perkawinan; 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana; 5) Peningkatan dan pengembangan kegiatan ketahanan keluarga dan remaja, serta pemberdayaan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pertimbangan alokasi anggaran secara proporsional dan tepat sasaran, melalui pemanfaatan sumberdaya *existing* sebaik mungkin, sehingga mampu memberikan daya ungkit yang signifikan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Namun, untuk mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja pada tahun berikutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, akan berupaya mengajukan usulan untuk peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana demi menunjang pelaksanaan setiap program/kegiatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**